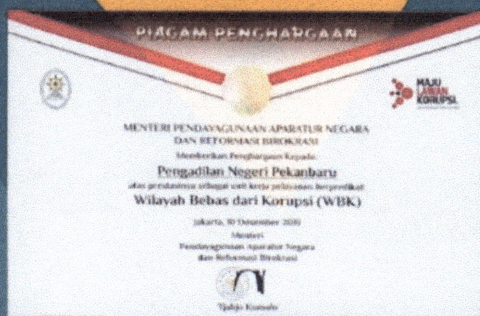




**PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	85%	85%	85%
		2. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	50%	50%	50%	50%
		3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%	100%	100%
		4. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		5. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	5%	10%	15%
		6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89%	89%	89%	89%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%	80%
		8. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	10%	15%
		9. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%	94%	94%	94%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu								Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara perdata yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.2	Indikator : Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu								- Untuk Gugatan diatas 150 juta Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara - Untuk Gugatan dibawah 150 juta biaya dari DIPA PN Pekanbaru Rp. 90.000.000,-
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara PHI yang lebih dari 50 hari kerja	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara PHI yang lebih dari 50 hari kerja	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara PHI tidak melebihi 50 hari kerja	√	√	√	√	Perkara PHI yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara PHI yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara PHI yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

JADWAL PELAKSANAAN						KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
NO	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.3	Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu								Rp. 528.360.000,-
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara pidana tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara pidana yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.4	Indikator : Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu								Rp. 64.000.000,-
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara tipikor yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara tipikor	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara tipikor yang lebih dari 5 bulan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara tipikor tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara tipikor yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara tipikor yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara tipikor yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

JADWAL PELAKSANAAN						KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
NO	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.5	Indikator : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif								Rp. 528.360.000,-
1.	Mendata perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Peningkatan kemampuan Hakim melalui diklat, sosialisasi terkait penanganan perkara berbasis keadilan restoratif	√	√	√	√	Orang	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

		JADWAL PELAKSANAAN									
NO	AKSI / KEGIATAN					KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN		DANA (RP)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV						
1.6	Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding									Rp. 6.600.000,-	
1.	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
2.	Perkara perdata yang diselesaikan ditingkat pertama	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
3.	Perkara tipikor yang diselesaikan ditingkat pertama	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
4.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding pada pengadilan tingkat pertama.	√	√	√	√	Terdatanya perkara perdata, pidana dan pidana khusus yang tidak melakukan upaya hukum banding pada pengadilan tingkat pertama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

JADWAL PELAKSANAAN						KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
NO	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.7	Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi								Rp. 10.000.000,-
1.	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat banding	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Perkara perdata yang diselesaikan ditingkat banding	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Perkara tipikor yang diselesaikan ditingkat banding	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Perkara PHI yang diselesaikan ditingkat pertama	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama.	√	√	√	√	Terdatanya perkara perdata, pidana, PHI dan pidana khusus yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.8	Indikator : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi								Rp. 528.360.000,-
1.	Penyelesaian perkara anak melalui diversi	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

JADWAL PELAKSANAAN						KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
NO	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.9	Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan								Rp. 10.000.000,-
1.	Melaksanakan SKM melalui aplikasi Sisuper	√	√	√	√	Kuesioner SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
2.	Menyusun Laporan Hasil SKM					Laporan SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
3.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	√	√	√	√	Laporan tindak lanjut hasil survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	6%	5%	6%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

JADWAL PELAKSANAAN						KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
NO	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
2.1	Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu								Dana Bersumber dari Pihak Berperkara
1.	Melakukan registrasi pendaftaran perkara a. Perdata b. PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melakukan penetapan hari sidang, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti a. Perdata b. PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan a. Perdata b. PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

4.	Melakukan minutasi/ upaya hukum a. Perdata b. PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Pengiriman pemberitahuan putusan kepada para pihak a. Perdata b. PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Salinan Putusan untuk perkara Perdata/ PHI Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7.	Melakukan Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama a. Pidana Umum	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

	b. Pidana Korupsi c. PHI								
8.	Melakukan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama a. Pidana Umum b. Pidana Korupsi c. PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
2.2	Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu								Rp. 528.360.000,-
1.	Melakukan registrasi pendaftaran perkara a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

2.	Melakukan penetapan hari sidang, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Melakukan Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

5.	Pengiriman pemberitahuan putusan kepada para pihak a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Melakukan minutas/ upaya hukum a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7.	Melakukan Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
8.	Melakukan Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

	a. Pidana b. Tipikor								
9.	Melakukan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama a. Pidana b. Tipikor	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	JADWAL PELAKSANAAN					KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
2.3	Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi								Dana Bersumber dari Pihak Berperkara
1.	Melakukan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Mendata mediasi yang berhasil	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%

NO		JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
AKSI / KEGIATAN		TW I	TW II	TW III	TW IV				
3.1	Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan								Rp. 94.690.000,-
1.	Penyelesaian perkara Prodeo - Perdata - PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Mendata jumlah perkara prodeo yang putus	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	JADWAL PELAKSANAAN					KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
	AKSI / KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV				
3.2	Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)								Rp. 44.000.000,-
1.	Pendampingan terhadap masyarakat miskin pencari keadilan melalui layanan bantuan hukum	√	√	√	√	Orang	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Mendata jumlah masyarakat yang mendapat layanan Posbakum	√	√	√	√	Orang	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%	20%	25%	25%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
4.1	Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)								Perkara Perdata biaya eksekusi dari Pihak Berperkara
1.	Melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan - Perdata - PHI	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Mendata jumlah pelaksanaan eksekusi Perdata dan PHU	√	√	√	√	Perkara	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



RADEN HERU KUNTODEWO